

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno 2017:9).

Menurut Arsyad (2016:11) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan *rill* perkapita penduduk suatu Negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Unsur-unsur pokok dan sifat dari pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara kontinyu.
2. Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
3. Peningkatan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.

Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang misalnya (ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem kelembagaan ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek perbaikan di bidang aturan main (*Rule of the games*), baik aturan formal maupun informal dan organisasi (*players*) yang mengimplementasikan aturan main tersebut.

2.1.1.2 Faktor – Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu, tanah dan kekayaan alam lainnya, jumlah dari mutu penduduk dan tenaga kerja, barang-barang modal dan tingkat teknologi serta sistem sosial dan sistem masyarakat (Sukirno 2017:429).

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam, faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber alamnya, sumber daya manusia, modal usaha, teknologi, yang semua merupakan faktor ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik, nilai –nilai moral dalam suatu negara atau daerah tidak menunjang. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah (Jhingan 2013:67-76) :

1. Faktor Produksi

Sumber daya alam, faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber daya alam atau tanah. Tanah sebagaimana dipergunakan dalam ilmu ekonomi mencakup sumber alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunan kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, lautan dan sebagainya. Dalam pertumbuhan ekonomi tersedianya sumber daya alam secara melimpah merupakan hal yang penting. Namun demikian, yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan secara tepat dengan teknologi yang baik sehingga efisiensi dipertinggi dan sumber daya alam dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang lebih lama.

a. Sumber daya alam, faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu

perekonomian adalah sumber daya alam atau tanah. Tanah sebagaimana dipergunakan dalam ilmu ekonomi mencakup sumber alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunan kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, lautan dan sebagainya. Dalam pertumbuhan ekonomi tersedianya sumber daya alam secara melimpah merupakan hal yang penting. Namun demikian, yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan secara tepat dengan teknologi yang baik sehingga efisiensi dipertinggi dan sumber daya alam dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang lebih lama.

- b. Akumulasi modal, faktor ekonomi penting kedua dalam pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal. Modal berarti persediaan faktor produksi secara fisik dapat diproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas tertentu, hal ini disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Pembentukan modal merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi. Disatu pihak ini mencerminkan permintaan efektif, dan dilain pihak ini menciptakan efisiensi produktif bagi produksi di masa depan. Proses pembentukan modal dapat menghasilkan kenaikan pendapatan nasional dalam berbagai cara.
- c. Organisasi, organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh dalam membantu meningkatkan produktifitasnya.
- d. Kemajuan teknologi, perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil

perubahan atau hasil teknik penelitian baru. Perubahan teknologi akan meningkatkan produktifitas buruh, modal dan faktor produksi lainnya.

- e. Pembagian kerja dan skala produksi, spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktifitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri.

2. **Faktor Non Ekonomi**

- a. Faktor sosial, jika pembangunan ekonomi diinginkan berjalan mulus, pandangan nilai-nilai dan lembaga sosial harus diubah. Perubahan hanya mungkin terjadi melalui penyebaran pendidikan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi bila tatanan sosial dipengaruhi oleh sistem yang ketat dan sistem yang *family*. kebebasan individu dan mobilitas untuk bekerja lebih keras, mendapatkan lebih banyak menabung lebih banyak.
- b. Faktor Manusia, persyaratan yang lebih penting bagi laju pertumbuhan ekonomi adalah manusia. Manusia yang berdedikasi terhadap pembangunan negerinya dan terhadap kejujuran, kewibawaan, pengetahuan dan prestasi kerja.
- c. Faktor Politik dan Administrasi Kerja, faktor politik dan administrasi kerja juga membantu pertumbuhan ekonomi modern. Lewis dengan tepat melihat tindakan pemerintah memainkan peranan penting dalam merangsang dan mendorong kegiatan ekonomi. Ketertiban stabilitas dan perlindungan hukum mendorong kewiraswastaan, semakin besar kebebasan itu makan semakin besar pula kewiraswastaan itu.

2.1.1.3 Teori - Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik (Adam Smith)

Menurut Adam Smith, proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua aspek utama yakni pertumbuhan *output* total dan pertumbuhan penduduk (Arsyad, 2016:74-76).

1) Pertumbuhan Output Total

Menurut Smith, unsur pokok dari sistem produksi suatu negara ada tiga yaitu:

- a. Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Dimana jumlah Sumber Daya Alam yang tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian.
- b. Sumber daya manusia merupakan peran pasif dalam proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Dalam hal ini, Smith memandang tenaga kerja sebagai salah satu input dalam proses produksi dan pembagian kerja (*division of labor*) dan spesialisasi merupakan faktor kunci bagi peningkatan produktifitas tenaga kerja.
- c. Akumulasi modal. Menurut Smith, stok modal memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Stok modal dapat diidenttikan sebagai “dana pembangunan” cepat lambatnya pembangunan ekonomi tergantung pada ketersediaan “dana pembangunan” tersebut. Selain itu, stok modal merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat

pertumbuhan output. Peranannya sangat sentral dalam pertumbuhan output jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal sesuai dengan “batas maksimum” sumber daya alam dengan kata lain, pertumbuhan output akan melambat jika “daya dukung” sumber daya alam tidak mampu lagi mengimbangi laju kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat.

2) Pertumbuhan Penduduk

Menurut Smith, pertumbuhan penduduk dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi bertambahnya penduduk akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian. Sebagai dampak dari adanya spesialisasi yang terjadi maka tingkat kegiatan ekonomi akan bertambah. Karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi.

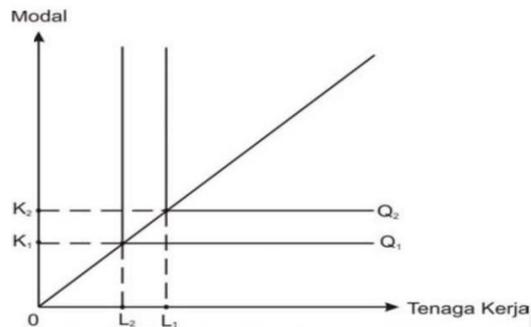
2. Teori Pertumbuhan Keynesian (Harrod Dan Domar)

Menurut Harrod Dan Domar, Setiap perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung sebagian tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal (gedung, alat-alat, dan bahan baku) yang telah susut atau rusak. Akan tetapi, untuk bisa tumbuh dibutuhkan adanya investasi yang merupakan tambahan neto ke dalam persediaan modal. Jika kita asumsikan bahwa ada hubungan ekonomi langsung antara jumlah total persediaan modal, K , dengan GDP total, Y -misalnya, jika dibutuhkan modal

sebesar \$3 untuk menghasilkan tambahan GDP tahunan sebesar \$1- maka hal itu berarti bahwa setiap tambahan neto pada persediaan modal dalam bentuk investasi baru akan menghasilkan kenaikan arus output nasional (Todaro dan Smith, 2011:136).

Teori Harrod-Domar merupakan pengembangan dari teori makro Keynes. Mengenai pembentukan modal dalam kegiatan ekonomi. Analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi jangka panjang. menurut Harrod dan Domar, pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat serta kenaikan kapasitas produksi juga ditentukan oleh pengeluaran masyarakat. Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi yaitu (Arsyad, 2016 83:84):

- 1) Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) faktor-faktor produksi yang ada juga dimanfaatkan secara penuh (*full utilization*).
- 2) Perekonomian terdiri dari 2 sektor, rumah tangga dan sektor perusahaan.
- 3) Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional.
- 4) Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga *ratio* antara modal-output (*capital-output ratio = COR*) dan rasio pertambahan modal-output (*incremental capital output ratio = ICOR*) COR dan ICOR bisa dilihat pada gambar kurva berikut ini:



Gambar 2.1
Kurva fungsi produksi Harrod dan Domar

Dalam teori Harrod dan Domar, fungsi produksinya berbentuk L karena sejumlah modal hanya dapat menciptakan sejumlah output tertentu (modal dan tenaga kerja tidak substitutif) untuk menghasilkan output sebesar Q_1 diperlukan modal sebesar k_1 dan tenaga kerja sejumlah L_1 , dan apabila kombinasi itu berubah maka tingkat output pun ikut berubah. Misalnya untuk output sebesar Q_2 , hanya dapat diciptakan dengan stok modal sebesar K_2 .

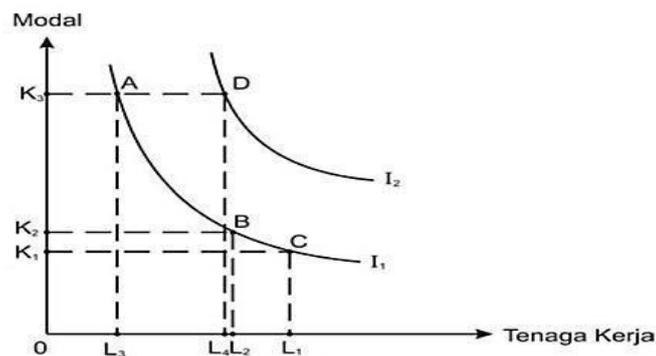
3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik (Solow dan Swan)

Menurut teori Solow Dan Swan, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada ketersediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Dalam teori Solow dan Swan ini, *capital output ratio* (COR) dapat berubah-ubah, artinya dalam menghasilkan tingkat output tertentu dapat digunakan kombinasi modal dan tenaga kerja yang berbeda-beda. Jika lebih banyak modal yang digunakan, tenaga kerja yang dibutuhkan sedikit, dan sebaliknya. Dengan adanya fleksibilitas ini suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tak terbatas dalam menentukan kombinasi antara

modal (K) dan tenaga kerja (L) yang akan digunakan untuk menghasilkan tingkat output tertentu (Arsyad, 2016 88-89).

Sifat teori pertumbuhan neoklasik Nampak pada gambar 2.2. Fungsi produksinya ditunjukkan oleh I_1 , I_2 , dan seterusnya. Dalam fungsi produksi yang berbentuk demikian, suatu tingkat output tertentu dapat diciptakan dengan menggunakan berbagai kombinasi modal dan tenaga kerja. Misalnya untuk menciptakan output besar I_1 , kombinasi modal dan tenaga kerja yang dapat digunakan antara lain (a) K_3 dengan L_3 (b) K_2 dengan L_2 , dan (c) K_1 dengan L_1 .

Dengan demikian, meskipun jumlah modal berubah namun terdapat kemungkinan bahwa tingkat output tidak mengalami perubahan. Di samping itu, tingkat output tetap dapat mengalami perubahan meskipun jumlah modalnya konstan. Misalnya, meskipun jumlah modal diasumsikan tidak mengalami perubahan, sebesar K_3 , namun jumlah output dapat diperbesar dari I_1 menjadi I_2 , jika tenaga kerja yang digunakan bertambah dari L_3 menjadi L_4 .



Gambar 2.2
Kurva fungsi produksi Neo Klasik

Teori pertumbuhan neoklasik juga dapat disajikan ke dalam bentuk fungsi produksi Cobb-Douglass, di mana output merupakan fungsi dari tenaga kerja dan

modal. Sedangkan tingkat kemajuan teknologi merupakan variabel eksogen. Asumsi yang digunakan dalam model Solow-Swan adalah skala pengembalian yang konstan (*constant returns to scale*), substitusi antara modal (K) dan tenaga kerja (L) bersifat sempurna, dan adanya produktivitas marginal yang semakin menurun (*diminishing marginal productivity*) dari tiap inputnya (Arsyad, 2016 88-89).

$$Q_t = T_t^a \cdot K_t \cdot L_t^b \dots\dots\dots (2.1)$$

4. Teori Schumpeter

Teori schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang – barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan sesuatu barang, memperluas pasae sesuatu barang ke pasaran – pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan – perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi koefisienan kegiatan perusahaan.

Di dalam mengemukakan teori pertumbuhannya Schumpeter memulai analisisnya dengan memisalkan bahwa perekonomian sedang dalam keadaan tidak berkembang. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama. Pada waktu keadaan tersebut berlaku, segolongan pengusaha menyadari tentang berbagai kemungkinan untuk mengadakan inovasi yang menguntungkan. Didorong oleh keinginan

mendapatkan keuntungan dari mengadakan pembaharuan tersebut, mereka akan meminjam modal dan melakukan penanaman modal. Penanaman modal otonomi adalah penanaman modal yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi yang timbul sebagai akibat kegiatan baru.

Menurut Schumpeter makin tinggi tingkat kemajuan suatu ekonomi semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat alannya. Pada akhirnya akan tercapai tingkat “keadaan tidak berkembang” atau “*stationary state*”. Akan tetapi, berbeda dengan pandangan Klasik, dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pandangan ini berbeda dengan pandangan Klasik. Seperti telah diterangkan, menurut pandangan Klasik tingkat tersebut dicapai pada waktu perekonomian telah berada kembali pada tingkat pendapatan subsisten, yaitu pada tingkat pendapatan yang sangat rendah.

2.1.2 Tenaga Kerja

2.1.2.1 Pengertian Tenaga Kerja

Sumber daya manusia mengandung dua pengertian, yaitu: (1). Sumber daya manusia yang mengandung pengertian usaha kerja, artinya sumber daya manusia yang mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. (2). Sumber daya manusia yang menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Pengertian mampu bekerja adalah mampu untuk melakukan

kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomis yang berupa barang dan jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*) secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, artinya semakin banyak angkatan kerja berarti semakin banyak faktor produksi tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan pasar domestik. Walaupun demikian peningkatan penawaran tenaga kerja yang berpengaruh positif maupun negatif terhadap perekonomian masih tergantung pada kemampuan sistem ekonomi tersebut dalam menyerap dan memperkerjakan tambahan tenaga kerja itu secara produktif. Kemampuan tersebut bergantung pada tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya faktor-faktor lain yang dibutuhkan seperti keahlian manajerial dan administratif (Arsyad, 2004:215).

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi output suatu daerah. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi dari Desa ke Kota.

Tenaga kerja di definisikan sebagai penduduk dalam usia kerja (*working-*

age population). Tenaga kerja atau *manpower* terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia untuk sanggup bekerja (Sumarsono, 2009:3).

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut, sedangkan angkatan kerja yaitu bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu produksi barang dan jasa (Subri, 2014:71-72). Menurut Subri (2014:72) angkatan kerja adalah tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif, yaitu produksi barang dan jasa. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja adalah jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umum sebagai persentase penduduk dalam kelompok umur tersebut.

Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja dapat juga diartikan sebagai penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan.

Tujuan adanya perluasan kesempatan kerja adalah : (1). Menurunkan tingkat pengangguran yang terbuka maupun tersembunyi; (2). Berkembangnya kesempatan kerja yang semakin mampu menyerap angkatan kerja baru; (3). Menurunkan beban ketergantungan setiap orang yang bekerja.

2.1.2.2 Klasifikasi Tenaga Kerja

Tenaga kerja, adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

1. Bukan tenaga kerja, adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.
2. Angkatan kerja, adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.
3. Bukan angkatan Kerja, adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah: anak sekolah dan mahasiswa/mahasiswi para ibu rumah tangga dan orang cacat.
4. Tenaga kerja terdidik, adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.
5. Tenaga kerja terlatih, adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini

dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.

6. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya (<https://id.m.wikipedia.org>2021).

2.1.2.3 Penyediaan Tenaga Kerja

Penyediaan tenaga kerja adalah jumlah penduduk yang sedang dan siap untuk bekerja dan pengertian kualitas usaha kerja yang diberikan. Secara umum, penyediaan tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah penduduk, tenaga kerja, jam kerja, pendidikan, produktivitas, dan lain-lain. Penyediaan tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan struktur umur. Semakin banyak penduduk dalam umur anak-anak, semakin kecil jumlah yang tergolong tenaga kerja. Penyediaan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh lamanya orang bekerja setiap minggu. Lamanya orang bekerja setiap minggu tidak sama. Ada orang yang bekerja penuh. Akan tetapi banyak juga orang yang bekerja hanya beberapa jam seminggu atas keinginan dan pilihan sendiri atau karena terpaksa berhubung terbatasnya kesempatan untuk bekerja penuh. Oleh sebab itu, penyediaan tenaga kerja tidak cukup hanya dengan memperhatikan jumlah orang yang bekerja, akan tetapi perlu juga memperhatikan berapa jam setiap orang itu bekerja dalam seminggu. Penyediaan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh tingkat produktivitas kerja. Banyak orang yang bekerja keras akan tetapi banyak juga

orang yang bekerja dengan hanya sedikit usaha. Hasil yang diperoleh dari dua cara kerja tersebut tentu akan berbeda. Produktivitas kerja seseorang juga dipengaruhi oleh motivasi dari tiap-tiap individu, tingkat pendidikan dan latihan yang sudah diterima, dan kemampuan manajemen. Orang yang berpendidikan dan/atau latihan yang lebih tinggi pada dasarnya mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi juga. Manajemen yang relatif baik akan mampu mengarahkan karyawannya untuk berproduktivitas kerja tinggi.

2.1.2.4 Teori Tenaga Kerja

Simanjuntak (1998) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Perluasan kesempatan kerja dan penggunaan tenaga kerja yang penuh, serta memberikan imbalan dan penghargaan yang layak, mempunyai peranan yang menentukan bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial jangka panjang. Tenaga kerja bukan hanya penting sebagai subjek yang melakukan segala kegiatan pembangunan. Akan tetapi juga penting karena pendapatan yang mereka peroleh dari pekerjaan akan memberikan daya beli kepada masyarakat dan seterusnya menimbulkan permintaan efektif mengenai barang dan jasa yang dihasilkan dalam pembangunan. Atau dengan kata lain, pekerjaan yang memberikan imbalan pendapatan yang layak akan mampu menimbulkan dan membutuhkan pasar dalam negeri.

1. Teori Lewis

Teori Lewis (Tadaro, 2011) yang mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain. Ada dua struktur di dalam perekonomian negara berkembang, yaitu sektor kapitalis modern dan sektor subsisten terbelakang.

Menurut Lewis sektor subsisten terbelakang tidak hanya terdiri dari sektor pertanian, tetapi juga sektor informal seperti pedagang kaki lima dan pengecer koran. Sektor subsisten terbelakang mempunyai kelebihan penawaran pekerja dan tingkat upah relatif murah daripada sektor kapitalis modern. Lebih murah biaya upah pekerja asal pedesaan akan dapat menjadi pendorong bagi pengusaha di perkotaan untuk memanfaatkan pekerjaan tersebut dalam pengembangan industri modern perkotaan. Selama berlangsungnya industrialisasi, kelebihan penawaran pekerja di sektor subsisten terbelakang akan diserap.

2. Teori Marx

Teori Marx menyatakan bahwa nilai tenaga kerja harus tergantung pada jumlah jam kerja yang dibutuhkan masyarakat, rata-rata, untuk memberi makanan, pakaian, dan tempat tinggal pekerja sehingga ia memiliki kapasitas untuk bekerja. Dengan kata lain, upah jangka panjang yang pekerja menerima akan tergantung pada jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan orang yang cocok untuk pekerjaan. Misalkan lima jam kerja yang diperlukan untuk memberi makan,

pakaian, dan melindungi pekerja setiap hari sehingga pekerja cocok untuk pekerjaan keesokan harinya. Jika satu jam kerja setara satu dollar, upah yang Teori benar akan menjadi lima dollar per hari.

3. Teori Keynes

Teori Keynes menyatakan bahwa kaum klasik percaya bahwa perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan (equilibrium). Dalam posisi keseimbangan semua sumber daya, termasuk tenaga kerja, akan digunakan secara penuh (fullemployed). Dengan demikian di bawah sistem yang didasarkan pada mekanisme pasar tidak ada pengangguran. Kalau tidak ada yang bekerja, daripada tidak memperoleh pendapatan sama sekali, maka mereka bersedia bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah, kesediaan untuk bekerja dengan tingkat upah lebih rendah ini akan menarik perusahaan untuk mempekerjakan mereka lebih banyak.

4. Teori Harrod – Domar

Teori Harrod-Domar menyatakan investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Peran modal dalam model pertumbuhan sangat penting, akan tetapi kapasitas produksi hanya dapat meningkat bila sumber daya lain (modal fisik) membesar. Disamping itu dalam model pertumbuhan, jumlah penduduk yang besar tidak mengurangi pendapatan per kapita asalkan modal fisiknya meningkat. Model yang sama juga dikemukakan oleh model Solow dimana dalam model ini dipakai suatu fungsi

produksi Cobb-Douglas. Angkatan kerja di asumsikan tumbuh secara geometris dan full employment selalu tercapai. Tetapi dalam model ini pekerja sudah diperluas secara jelas sebagai salah satu faktor produksi, dan bukan sekedar pembagi (untuk memperoleh output pekerja). dalam model ini juga dilihat substitusi antara modal fisik dan pekerja.

5. Teori penawaran dan permintaan tenaga kerja

Suparmoko dan Maria (2000) menjelaskan bahwa pada prinsipnya teori penawaran tenaga kerja dan teori permintaan tenaga kerja merupakan fungsi dari tingkat upah, di mana pendapat dari kaum klasik menyatakan, jika semakin tinggi tingkat upah yang diminta oleh kaum pekerja maka akan semakin sedikit jumlah penawaran tenaga kerja (lowongan kerja) yang dapat diberikan dan akan berlaku sebaliknya. Dalam memahami mekanisme pasar tenaga kerja harus dilihat bagaimana individu pekerja terdapat perbedaan, maka untuk menentukan kuva penawaran tenaga kerja pada suatu daerah adalah dengan menjumlahkan kurva-kurva penawaran dari setiap individu, oleh sebab itu kurva dari penawaran tenaga kerja berbentuk melengkung kebelakang (backward bending curve).

6. Teori keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja

Keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat terjadi jikalau pencari kerja dan pemberi lowongan kerja telah sepakat atas tingkat upah, sehingga kesepakatan tersebut disebut sebagai keseimbangan (equilibrium). Todaro (2003) menyatakan bahwa dalam pasar persaingan sempurna (perfect

competition), di mana tidak ada satupun produsen dan konsumen yang mempunyai pengaruh atau kekuatan yang cukup besar untuk mendikte harga-harga input maupun output, tingkat penyerapan tenaga kerja (level of employment) dan harganya (tingkat upah) ditentukan secara bersamaan oleh segenap harga-harga output dan faktor-faktor produksi selain tenaga kerja.

2.1.3 Pengeluaran Pemerintah

2.1.3.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah yang berarti menunjukkan kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran setiap tahunnya. Menurut Sukirno (2008:275), Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. Masyarakat yang paham akan wajib pajak juga akan menyadari bahwa pajak yang dibayar tentu akan juga digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah juga dapat diartikan sebagai penggunaan uang dan sumberdaya suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep

perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa :

$$Y = C + I + G + X - M \dots\dots\dots(2.2)$$

Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional, sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variable-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variable G menyatakan pengeluaran pemerintah (Government expenditures), I investment, X-M adalah net ekspor. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional. Dengan ini, dapat dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam perekonomian nasional. Pemerintah tentu saja tidak hanya melakukan pengeluaran, tetapi juga memperoleh penerimaan. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah dimasukkan dalam suatu konsep terpadu mengenai pendapatan dan belanja negara. Kebijakan- kebijakan yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah (pendapatan dan belanja negara) disebut kebijakan fiskal.

Pengeluaran pemerintah biasanya direncanakan jauh lebih dulu. Jadi pemerintah membuat daftar anggaran yang akan dikeluarkan setiap tahunnya, yang di Indonesia dijabarkan dalam Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN).

2.1.3.2 Macam – Macam Pengeluaran Pemerintah

Menurut macamnya, pengeluaran negara dibedakan menjadi 2, yaitu menurut organisasi dan menurut sifat. Menurut organisasi, pengeluaran negara digolongkan menjadi 3, yakni :

a. Pemerintah Pusat

Dalam pemerintah pusat, terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah Pusat dibedakan menjadi 2 yang meliputi pengeluaran untuk belanja dan pengeluaran untuk pembiayaan. Pengeluaran untuk belanja antara lain digunakan untuk belanja pemerintah pusat seperti, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dll. Juga untuk dialokasikan ke daerah untuk dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. Sedangkan pengeluaran untuk pembiayaan meliputi pengeluaran untuk obligasi pemerintah, pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dll.

b. Pemerintah Provinsi

Jika pada pemerintah pusat terdapat APBN, maka di pemerintah provinsi terdapat APBD yang merupakan hasil dari dana alokasi APBN dari pemerintah pusat dan hasil dari pungutan pajak dari masyarakat. Dana APBD digunakan untuk pengeluaran untuk belanja meliputi belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja

hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasi lainnya. Sedangkan belanja modal seperti belanja aset tetap, belanja aset lain-lain, dan belanja tak terduga.

c. Pemerintah Kabupaten/Kota

APBD dalam Kabupaten/Kota digunakan antara lain untuk pengeluaran untuk belanja, bagi hasil pendapatan ke Desa/Kelurahan, Bagi hasil pendapatan ke desa/kelurahan, terdiri dari bagi hasil pajak ke Desa/Kelurahan, bagi hasil retribusi ke Desa/Kelurahan, bagi hasil pendapatan lainnya ke Desa/Kelurahan, pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri dari, pembayaran Pokok Pinjaman, penyertaan modal pemerintah, pemberian pinjaman kepada BUMD/BUMN/Pemerintah Pusat/Kepala Daerah otonom lainnya. Sedangkan menurut sifatnya, pengeluaran negara dibedakan menjadi 5, antara lain :

a. Pengeluaran Investasi

Pengeluaran investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa datang. Misalnya, pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit, peningkatan kapasitas SDM, dll.

b. Pengeluaran Penciptaan Lapangan Kerja

Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.

c. Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat

Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat adalah pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, atau pengeluaran yang dan

membuat masyarakat menjadi bergembira. Misalnya pengeluaran untuk pembangunan tempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana, dll.

d. Pengeluaran Penghematan Masa Depan

Pengeluaran penghematan masa depan adalah pendapatan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang. Pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, pengeluaran untuk anak-anak yatim, dll.

e. Pengeluaran Yang Tidak Produktif

Pengeluaran yang tidak produktif adalah pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk biaya perang.

2.1.3.3 Pengaruh Pengeluaran Negara Terhadap Perekonomian

Dalam pengeluaran negara, dapat menimbulkan dampak atau pengaruh terhadap perekonomian. Ada beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar atau kecilnya pengeluaran negara, antara lain:

a. Sektor Produksi

Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa. Dilihat secara agregat pengeluaran negara merupakan faktor produksi (money), melengkapi faktor-faktor produksi yang lain (man, machine, material, method, management). Pengeluaran

pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah.. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian, karena pendidikan akan menghasilkan SDM yang lebih berkualitas. Dengan SDM yang berkualitas produksi akan meningkat.

b. Sektor Distribusi

Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor distribusi barang dan jasa. Misalnya, subsidi yang diberikan oleh masyarakat menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati barang/jasa yang dibutuhkan, misalnya subsidi listrik, pupuk, BBM, dll. Pengeluaran pemerintah untuk biaya pendidikan SD-SLTA membuat masyarakat kurang mampu dapat menikmati pendidikan yang lebih baik (paling tidak sampai tingkat SLTA). Dengan pendidikan yang lebih baik, diharapkan masyarakat tersebut dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Apabila pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk keperluan tersebut, maka distribusi pendapatan, barang, dan jasa akan berbeda. Hanya masyarakat mampu saja yang akan menikmati tingkat kehidupan yang lebih baik, sementara masyarakat kurang mampu tidak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

c. Sektor Konsumsi Masyarakat

Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Dengan adanya

pengeluaran pemerintah untuk subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati suatu barang/jasa, namun juga menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan mengkonsumsi produk/jasa lebih banyak lagi. Kebijakan pengurangan subsidi, misalnya BBM, akan menyebabkan harga BBM naik, dan kenaikan harga BBM akan menyebabkan konsumsi masyarakat terhadap BBM turun.

d. Sektor Keseimbangan Perekonomian

Untuk mencapai target-target peningkatan PDB, pemerintah dapat mengatur alokasi dan tingkat pengeluaran negara. Misalnya dengan mengatur tingkat pengeluaran negara yang tinggi (untuk sektor-sektor tertentu), pemerintah dapat mengatur tingkat employment (menuju full employment). Apabila target penerimaan tidak memadai untuk membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah dapat membiayainya dengan pola defisit anggaran.

2.1.3.4 Teori – teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah jugadapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro.

1) Teori Makro

Mangkoesoebroto (2013 : 169-173) berpendapat bahwa teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan kedalam tiga golongan, yaitu:

a Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap – tahap pembangunan ekonomi, persentase investasi pemerintah dengan tahap – tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran – pengeluaran untuk aktivitas sosial.

b Hukum Wagner

Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relative pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama karena pemerintah harus mengatur

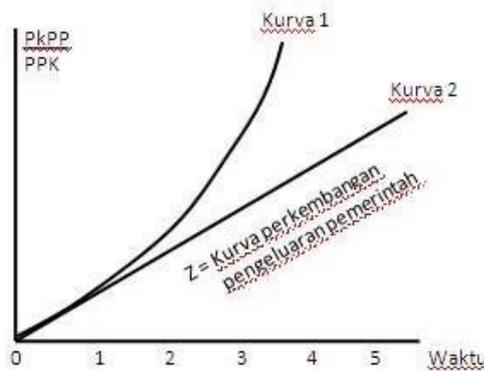
hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang – barang publik. Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{PP_kP}{PPK_1} < \frac{P_kPP_n}{PPK_2} < .. < \frac{P_kPP_n}{PPK_n} \dots\dots\dots (2.3)$$

PPkP : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk 1, 2, ...

N : jangka waktu (tahun)



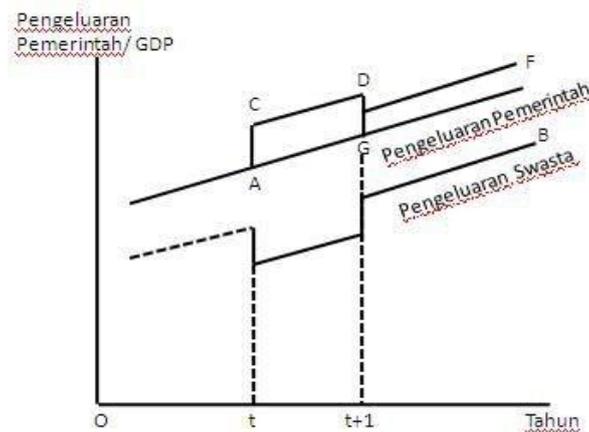
Gambar 2.3
Kurva fungsi produksi Wagner

Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut organic theory of state yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai

individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Kurva diatas menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat.

c Teori Pecock dan Wiesman

Teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Teori tersebut didasari oleh bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

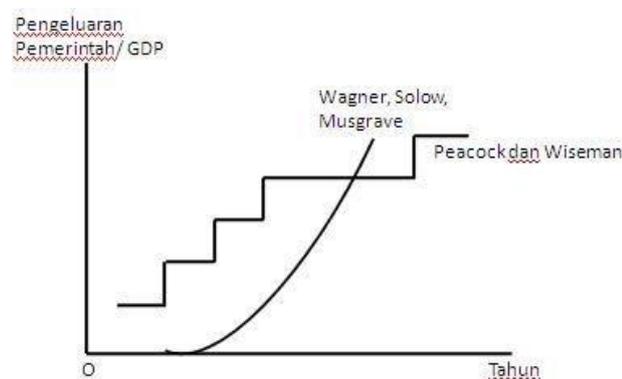


Gambar 2.4

Kurva fungsi produksi Pecock dan Wiesman

Dalam keadaan normal, t ke $t+1$, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada tahun $t+1$, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan.

Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, seperti kurva di bawah, tetapi berbentuk seperti tangga.



Gambar 2.5
Kurva perkembangan pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Sollow, dan Musgrave digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan

pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya.

d. Kebijakan Fiskal

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. Masyarakat yang paham akan wajib pajak juga akan menyadari bahwa pajak yang dibayar tentu akan juga digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Sukirno, 2008 : 275).

Dalam kebijakan fiskal, pemerintah mengalokasikan penerimaan negara dalam bentuk pajak maupun bukan ke dalam belanja negara. Keynes berpendapat bahwa ada dua pendekatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan kebijakan fiskal, yaitu: *income approach* (melalui pajak) dan *expenditure approach* (melalui pengeluaran). Menurutnya, perekonomian akan tumbuh dengan baik jika pemerintah menurunkan pajak atau menaikkan pengeluarannya (Mankiw, 2013:328).

2) Teori Mikro

Teori ini adalah untuk menganalisis faktor – faktor yang menimbulkan permintaan akan barang public dan faktor – faktor yang mempengaruhi

tersedianya barang public. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang public menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja (Mangkoesobroto, 2010 : 177).

Penentuan Permintaan :

$$U^i = f (G, X) \dots\dots\dots (2.4)$$

Keterangan :

G = faktor dari barang public
 X = faktor barang swasta
 i = individu;
 i = 1,, m
 U = fungsi utilitas

Perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dielaskan dengan beberapa faktor di bawah ini :

1. Perubahan permintaan akan barang public
2. Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang public, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi
3. Perubahan kualitas barang public
4. Perubahan harga faktor – faktor produksi

Penentuan tingkat output:

$$U_p = g (X, G, S) \dots\dots\dots (2.5)$$

Keterangan :

U_p = fungsi utilitas
 S = keuntungan yang diperoleh politisi dalam bentuk materi atau kedudukan
 G = faktor barang public

X = faktor barang swasta

Kita asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat diwakili seorang pemilih :

$$\text{Max } U_i = f(X, G) \dots \dots \dots (2.6)$$

Dengan pemuasan dibatasi kendala anggaran sehingga rumusnya :

$$P_x X + t B < M_i \dots \dots \dots (2.7)$$

Keterangan :

P = faktor harga barang swasta

X = faktor barang swasta

B_i = basis pajak individu 1

M_i = total pendapatan individu 1

T = tariff pajak

Kurva permintaan dari pemilik yang mewakili masyarakat ditentukan oleh 2 proses, yaitu dengan mengasumsikan pemilik tidak punya kemampuan mempengaruhi tarif pajak, sehingga dia bertindak sebagai pengambil harga (*Price Taker*). Atau, asumsikan kedua pemilik tidak bisa menentukan jumlah barang public, sehingga Ia bertindak sebagai pengambil output (*Output Taker*).

2.14 Hubungan Antar Variabel

2.1.4.1 Hubungan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut teori Solow-Swan, pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi seperti penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal serta kemajuan teknologi. Dalam teori tersebut Solow-Swan menyebutkan faktor tenaga kerja mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja disini tidak hanya kuantitas tenaga kerjanya saja melainkan kualitas tenaga kerja juga diperhitungkan. Modal manusia atau *human capital* merupakan salah satu

modal penting dalam meningkatkan produktifitas. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka produktivitas yang dihasilkan juga semakin tinggi, sehingga hal tersebut mampu memacu pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2016 : 88-89).

Menurut Adam Smith, Sumber daya manusia memegang peran pasif dalam proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Dalam hal ini, Smith memandang tenaga kerja sebagai salah satu input dalam proses produksi dan pembagian kerja (*division of labor*) dan spesialisasi merupakan faktor kunci bagi peningkatan produktifitas tenaga kerja.

Menurut Arsyad (2016:271) Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*) secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, artinya (1) semakin banyak jumlah angkatan kerja berarti semakin banyak pasokan tenaga kerja, (2) semakin banyak jumlah penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. Walaupun demikian peningkatan penawaran tenaga kerja yang berpengaruh positif maupun negatif terhadap perekonomian masih tergantung pada kemampuan sistem ekonomi tersebut dalam menyerap dan memperkerjakan tambahan tenaga kerja itu secara produktif kemampuan tersebut bergantung pada tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya faktor-faktor lain yang dibutuhkan seperti keahlian manajerial dan administratif.

2.1.4.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Peran pemerintah itu penting dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah mempunyai tujuan untuk membuat otonomi daerah dapat terlaksana dan juga kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. Masyarakat yang paham akan wajib pajak juga akan menyadari bahwa pajak yang dibayar tentu akan juga digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Sukirno, 2008 : 275).

Dalam kebijakan fiskal, pemerintah mengalokasikan penerimaan negara dalam bentuk pajak maupun bukan ke dalam belanja negara. Keynes berpendapat bahwa ada dua pendekatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan kebijakan fiskal, yaitu: *income approach* (melalui pajak) dan *expenditure approach* (melalui pengeluaran). Menurutnya, perekonomian akan tumbuh dengan baik jika pemerintah menurunkan pajak atau menaikkan pengeluarannya (Mankiw, 2013:328).

2.2 Penelitian Sebelumnya

Fitriani (2018) meneliti tentang Pengaruh Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DIY Tahun 2007 – 2015.

Analisis data yang digunakan merupakan analisis regresi linier berganda dengan model *common effect* yang diolah dengan menggunakan *evIEWS* 8. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan probabilitas sebesar 0,0644, 2) Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan probabilitas 0,0001, 3) Secara simultan Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan probabilitas sebesar 0,000000, 4) Nilai *Adjusted Rsquared* dalam penelitian ini adalah 0,517457 berarti nilai kontribusi seluruh variable independen dalam menjelaskan variable dependen sebesar 51,74%.

Nizar dkk (2013) meneliti tentang Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah *Ordinary Least Square (OLS)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi (PDB) terhadap tingkat kemiskinan secara langsung sangat kecil namun hubungannya negative dan signifikan. FDI, investasi pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya pengaruh estimasi pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat Kemiskinan secara langsung sangat kecil namun hubungannya negative dan signifikan. Untuk itu pemerintah hendaknya tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja akan tetapi lebih daripada itu pertumbuhan ekonomi harus berkualitas dan berkeadilan yaitu pertumbuhan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Eliza (2015) meneliti tentang Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, termasuk uji statistic. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata secara parsial investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Begitu pula secara simultan (bersama-sama) investasi, angkatan kerja dan pengeluaran pemerintah signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Suindyah D (2011) meneliti tentang Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan analisis data, hipotesis benar-benar diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel (investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah) memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya jika investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah meningkat karena pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Direkomendasikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, diperlukan adanya kepolisian untuk memotivasi semua pihak untuk melakukan investasi di provinsi ini. Upaya peningkatan investasi harus difokuskan pada kegiatan yang melibatkan

banyak tenaga kerja. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur menggunakan kepolisian untuk memotivasi semua pihak untuk melakukan investasi, meningkatkan kualitas tenaga kerja dan berhati-hati dalam menggunakan pengeluaran pemerintah.

Yunus, dkk (2019) meneliti tentang Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (studi pada kabupaten – kabupaten di Provinsi Aceh) dengan metode penelitian regresi linear berganda, dimana hasil penelitiannya berpengaruh positif dan tidak signifikan dimana arah hubungannya sejalan karena belanja modal yang dianggarkan dan dilaksanakan tidak dapat langsung memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana belanja modal butuh waktu dalam prosesnya, mulai dari anggaran, pelaksanaan baru dapat digunakan atau dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian.

Bachtiar, Achmad (2019) meneliti tentang Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Informal, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja informal, pengangguran, dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model teknik analisis data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja informal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Bawuno dkk (2015) meneliti tentang Pengaruh Investasi Pemerintahan dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh investasi pemerintah dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Manado. Teknik analisis yang di gunakan adalah model analisis regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Manado.

Humiang dkk dengan judul Analisis Pengaruh Investasi Swasta, Belanja Modal dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado Tahun 2003 – 2012. Teknik analisis yang digunakan adalah model analisis regresi linear berganda dengan Metode Ordinary Least Square (OLS). Berdasarkan hasil penelitian maka di dapat hasil, Investasi swasta berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota manado, Belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota manado sedangkan Tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota manado.

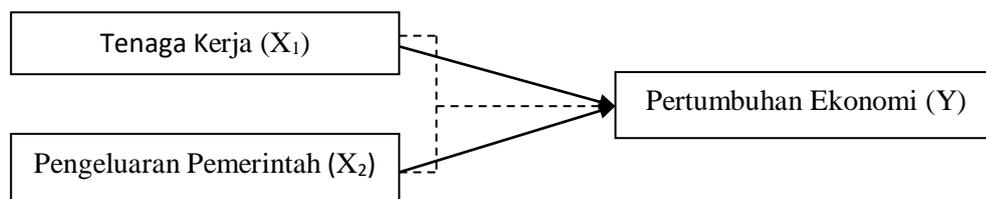
Harnita dkk (2020) meneliti tentang Pengaruh Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2004 sampai tahun 2018. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai koefisien sebesar 1,585 dan signifikan sebesar $0,022 < 0,05$ sedangkan variabel tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien sebesar -4,317 dan signifikan sebesar $0,253 > 0,05$.

Yunus (2019) meneliti tentang Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi (studi pada kabupaten – kabupaten di Provinsi Aceh) dengan metode penelitian regresi linear berganda, dimana hasil penelitiannya pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai variabel dari berbagai teori yang dideskripsikan berdasarkan landasan teori, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran pada gambar berikut :



Gambar 2.6
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- Secara Parsial
- Secara Simultan

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. Dengan kata lain hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti yang kemudian akan diteliti oleh peneliti, yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan (Kuncoro 2013:59).

Hipotesis dalam penelitian adalah diduga tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada periode tahun 2002 - 2020, baik secara parsial maupun secara simultan.